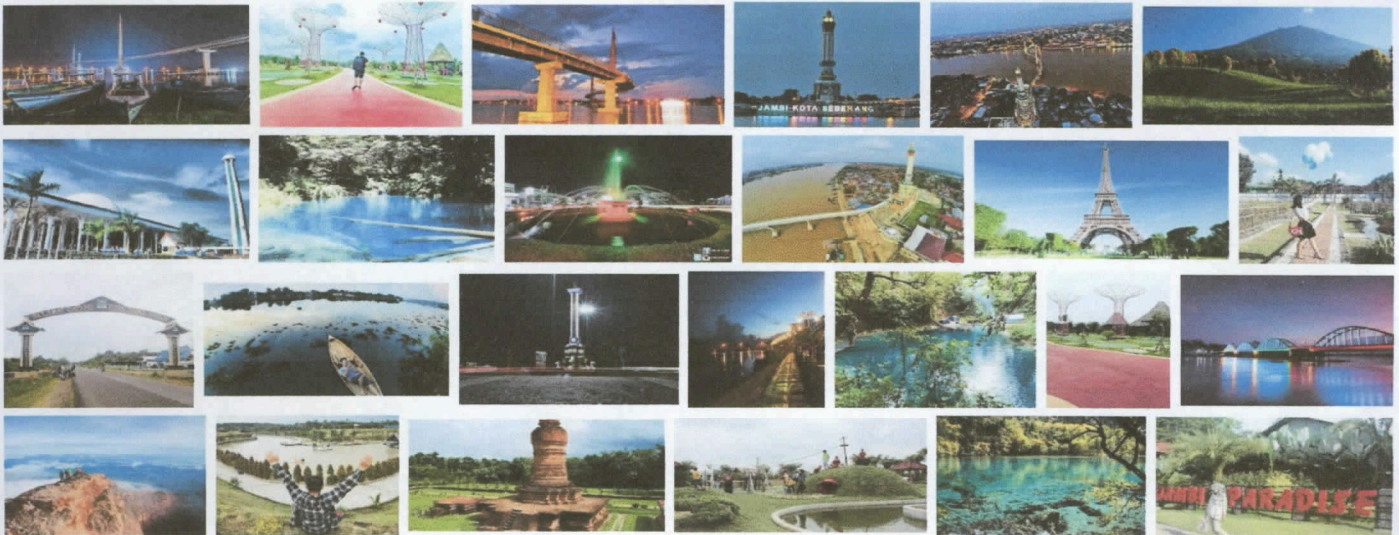




RENCANA KERJA (RENJA) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

JL. LETJEND M.T. HARYONO NO 2 TELP. (0741) 61606 FAX. (0741) 62317

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Melaksanakan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenaan. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan semangat dan tekad yang kuat Inspektorat Daerah Provinsi Jambi akan mewujudkan apa yang menjadi Tujuan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel Partisipatif* yang berorientasi pada Pelayanan Publik. Pada prinsipnya Rencana Kerja ini disusun dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai sarana panduan agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Jambi,

2023

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD 2021 - 2026	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD 2021-2026	8
2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan sebelumnya	15
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022.....	16
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	24
2.5 Permasalahan Yang Dihadapi.....	27
2.6 Hambatan dan Kendala.....	30
2.7 Upaya Pemecahan Masalah.....	31
2.8 Tantangan dan Peluang.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	34
3.2 Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN :	
Lampiran 1 Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	
Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026	
Lampiran 3 Renja SIPD Tahun 2023	

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra	8
Tabel 2.2	Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Pada Renstra sebelumnya Tahun 2021 -2016	15
Tabel 2.3	Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2022.....	16
Tabel 2.4	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	24
Tabel 2.5	Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2023	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang Ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	35
Tabel 3.2	Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah	39
Tabel 3.2.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024	42
Tabel 3.2.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Pagu Indikatif	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat dalam dokumen RKPD yang memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selamat setahun yang diperoleh dari Rencana Kerja (Renja) OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan penyusunan rencana dan program kerja merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri agar bersinergi dan sinkron dalam penyusunan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2022 telah beedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyusun Renja Inspektorat dengan mempedomani JMD Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Pasal 4 adalah Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat daerah..

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Inspektorat daerah Provinsi Jambi perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program pengawasan dan konsulting harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang –undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) 2015-2019;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah teilih dengan JMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah :

- a. Untuk Menjabarkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

- Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan beedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis;
- b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (JMD tahun 2021-2026);
 - c. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
 - d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : Evaluasi Renja OPD

1.1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.2 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Renja PD Tahun 2016-2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022

Berisikan rumusan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan atas Keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Renstra OPD.

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan sebelumnya

Berisikan pencapaian realisasi kinerja OPD pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022

Berisikan upaya yang telah dilakukan OPD dalam mencapai Target Kinerja OPD di tahun 2022.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan Strategi dan arah kebijakan PD yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional dan kepala daerah terpilih.

2.5 Permasalahan Yang Dihadapi

Berisikan masalah-masalah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah PD di tahun 2022.

2.6 Hambatan dan Kendala

Berisikan masalah PD dalam mencapai target kinerja di tahun 2022.

2.7 Upaya Pemecahan Masalah

Berisikan strategi PD dalam mengambil kebijakan dimasa akan datang di tahun 2023.

2.8 Tantangan dan Peluang

Berisikan rencana yang diambil OPD dimasa akan datang di tahun 2023.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD yang diselaraskan dengan program nasional dan kepala daerah terpilih.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB 2

EVALUASI RENJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD 2021-2026

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA 2022	TARGET KINERJA 2022 (Renstra)	CAPAIAN KINERJA 2022	Ket
1	2	3		4	5	6 = (4:5) * 100%	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	1	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	45,84%	90 %	50,93%	Tidak Tercapai
		2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Tercapai
		3	Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” didalam pengelolaan keuangan dan asset	60,46 %	60 %	100,77	Tercapai
		4	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B”.	88,37 %	95 %	93,72	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
		2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	Indeks 4.14	Indeks 3	138%	Tercapai
		3	Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	15,27 %	15 %	101,8%	Tercapai

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

1) Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 45,84%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 90%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjuti

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2022 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- b) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut secara berkelanjutan dengan PD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- c) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

Upaya meningkatkan hasil Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

2) Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP

Realisasi atas Indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Level 3 (terdefinisi), telah mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan pada OPD Provinsi Jambi khusus nya 10 sample OPD telah membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri. Adapun

upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2022 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan SPIP di OPD
- b) Melaksanakan rapat koordinasi SPIP secara berkala dan berkelanjutan dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- c) Memberikan bimbingan dan asistensi pengelolaan SPIP dan Penilaian Mandiri (PM) SPIP kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- d) Membuka kesempatan kepada seluruh OPD untuk konsultasi

Upaya meningkatkan hasil Tingkat Maturitas SPIP dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

3) Indikator Kinerja Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan asset sebesar 60,46 %,dari target 60% telah mencapai target yang diinginkan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah

- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyimpangan OPD bebas dari penyimpangan material.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Reviu Laporan Keuangan OPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

Upaya meningkatkan hasil Indikator Kinerja Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

4) Indikator Kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B”.

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B” sebesar 88,37 % dari target 95%, belum mencapai target yang diinginkan

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal PD secara berkala.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam pendampingan SAKIP Perangkat Daerah.
- Melakukan pendampingan lanjutan kepada PD dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

- Memberikan saran kepada masing-masing PD dalam peningkatan nilai Evaluasi Internal SAKIP.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran masing-masing pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam menunjang capaian kinerja organisasi yang akan di evaluasi secara internal.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan

Upaya meningkatkan hasil Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B" dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan dan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi

5) Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP

Realisasi atas Indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP level 3 dari target level 3, telah mencapai target yang diinginkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh APIP sehingga menjadi aparatur yang professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta menyusun rencana aksi.

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

6) Indikator Kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah

Realisasi atas Indikator kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dengan indeks 3 dari target indeks 3, telah mencapai target yang diinginkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.
- Membuka kesempatan kepada seluruh PD untuk konsultasi tentang Masalah dan Kasus per Kasus yang sedang dihadapi masing-masing PD.
- Meningkatkan kemampuan APIP dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan

Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

7) Indikator Kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi sebesar 15,27% dari target indeks 15%, telah mencapai target yang diinginkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Kemendagri secara intens terhadap jadwal pendidikan dan pelatihan APIP selama tahun 2022.
- Menyediakan Fasilitas Pembelajaran dengan *Sistem Daring* dan *Luring* untuk pemeriksa APIP Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Menyediakan anggaran khusus pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Dearah Provinsi Jambi.

Upaya meningkatkan Indikator Kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan sebelumnya.

Tabel 2.2

Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Renstra sebelumnya Tahun 2021 s.d 2026 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN HINGGA 31 DES 2022
			2021		2022		
			T	R	T	R	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	89,35%	46,21%	90%	54,96%	54,96%
		Persentase tindak lanjut temuan BPK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks kepuasan Auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	N/A	3	4,14	4,14
		Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	10%		15%	15,27%	15,27%

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

Tabel 2.3 Evaluasi Renja Inspektorat daerah Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	BB Indeks	27.227.970.245	97,24%	26.475.595.925	222,52%	60.589.011.363	97,23%	222,52%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	20 Dokumen	1.156.451.846	94,82%	1.096.574.111	157,68%	1.823.497.452	20 Dokumen	157,68%
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	3 Dokumen	612.858.972	99,46%	609.578.883	213,85%	1.310.590.484	4 Dokumen	213,85%
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	17 Dokumen	543.592.874	89,59%	486.995.228	94,35%	512.906.968	16 Dokumen	94,35%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	18.290.737.303	98,77%	18.065.082.549	231,44%	42.331.234.867	98,76%	231,44%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	14 Bulan	18.290.737.303	98,77%	18.065.082.549	231,44%	42.331.234.867	98 orang/triwulan	231,44%

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	2.750.239.632	93,97%	2.584.366.588	205,91%	5.663.011.797	93,96%	205,91%
A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
B	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	2.750.239.632	93,97%	2.584.366.588	37 Orang	5.663.011.797	65 orang	205,91%
C	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
D	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00%	-	0	-	0	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	2.107.994.963	98,92%	2.085.191.267	233,13%	4.914.296.400	98,91%	233,13%
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	35.087.545	99,89%	35.049.395	9 Paket	68.078.063	12 Paket	194,02%
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	89.030.118	99,79%	88.845.737	8 Paket	168.531.040	12 Paket	0

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
C	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	151.075.000	90,82%	137.206.533	20 Paket	314.845.021	26 Paket	208,40%
D	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	87.641.300	96,82%	84.857.744	6 Paket	159.428.444	12 Paket	181,91%
E	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	5.285.280	78,33%	4.140.000	2 paket	7.185.000	10 Paket	135,94%
F	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.739.875.720	99,73%	1.735.091.858	449 Laporan	4.196.228.832	498 Laporan	241,18%
G	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	-	0,00%	-	0	-	0	0
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.009.470.568	84,84%	856.390.958	229,59%	2.317.651.074	84,84%	229,59%
A	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0	-	0,00%	-	0	-	0	0
B	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	125 Unit	1.009.470.568	84,84%	856.390.958	178 Unit	2.317.651.074	178 Unit	229,59%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	866.004.933	92,32%	Rp 799.471.898	208,80%	Rp 1.808.197.073	92,31%	208,80%
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Surat Menyurat yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	101.978.620	59,58%	60.763.372	8 Laporan	148.352.244	8 Laporan	145,47%
B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	242.271.970	94,78%	229.623.272	8 Laporan	495.374.085	12 Laporan	204,47%
C	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	29.170.000	86,05%	25.100.000	10 Laporan	54.705.000	10 Laporan	187,54%
D	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	492.584.343	98,25%	483.985.254	8 Laporan	1.109.765.744	12 Laporan	225,29%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terperlihara	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.047.071.000	94,41%	988.518.554	165,33%	1.731.122.700	94,40%	165,33%
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan dibayarkan Pajaknya.	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	4 unit	269.130.000	93,30%	251.109.070	3 Unit	530.257.773	6 unit	197,03%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
B	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/Lapangan yang terpelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya.	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	7 unit	182.080.000	99,42%	181.022.208	16 unit	428.524.375	19 unit	235,35%
C	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	103 unit	120.197.800	79,58%	95.654.500	59 unit	207.758.000	135 unit	172,85%
D	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	3 unit	475.663.200	96,86%	460.732.776	1 unit	564.582.552	4 unit	118,69%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan sesuai PKPT	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	67%	7.329.773.347	93,21%	6.832.215.815	207,12%	15.181.572.853	67,11%	207,12%
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	67%	6.109.546.525	92,42%	5.646.272.985	184,92%	11.298.068.038	66,54%	59,22%
A	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	70%	1.343.363.560	98,81%	1.327.363.131	23 Laporan	2.380.320.548	51 Laporan	177,19%
B	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	70%	1.441.836.950	96,06%	1.385.036.880	23 Laporan	2.053.219.876	37 Laporan	142,40%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
C	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	125.758.000	97,77%	122.958.000	15 Laporan	410.135.750	21 Laporan	326,13%
D	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	520.778.060	99,99%	520.751.744	47 Laporan	1.067.807.580	55 Laporan	205,04%
E	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	70%	1.538.269.755	88,30%	1.358.231.160	14 Laporan	3.070.399.046	19 Laporan	199,60%
F	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	75%	1.139.540.200	81,78%	931.932.070	105 Dokumen	2.316.185.238	127 Dokumen	203,26%
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	67%	1.220.226.822	97,19%	1.185.942.830	260,02%	3.172.841.051	97,19%	76,69%
A	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian tuntutan kerugian negara/daerah yang ditangani	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	163.743.210	99,77%	163.367.510	1 Laporan	269.838.484	2 Laporan	164,79%
B	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	1.056.483.612	96,79%	1.022.575.320	16 Laporan	2.903.002.567	18 Laporan	274,78%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks Reformasi Birokrasi Katagori "B"	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel		2.965.794.252	95,24%	2.824.543.975	232,89%	6.906.926.023	36,19%	232,89%
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitas Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	7 Peraturan	45.930.000	61,53%	28.260.000	0,913129	41.940.000	10 Rekomendasi	1,50%
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	7 Peraturan	45.930.000	61,53%	28.260.000	5 Rekomendasi	41.940.000	10 Rekomendasi	91,31%
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	80%	2.919.864.252	95,77%	2.796.283.975	235,11%	6.864.986.023	95,76%	235,11%
A	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	42 OPD	259.059.300	99,51%	257.793.000	43 Perangkat Daerah	877.114.500	43 Perangkat Daerah	338,58%
B	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	42 OPD	150.531.660	98,01%	147.543.443	20 Perangkat Daerah	348.629.778	43 Perangkat Daerah	231,60%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
C	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	75 Kegiatan	2.393.088.232	95,38%	2.282.573.970	35 Kegiatan	5.262.949.570	44 Kegiatan	219,92%
D	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	2 OPD	117.185.060	92,48%	108.373.562	2 Perangkat Daerah	376.292.175	3 Perangkat Daerah	321,11%
									Persentase Serapan Anggaran per Desember 2022	96,29%	
Predikat Kinerja											

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak teisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Table 2.4
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT, (MANTAP)				
MISI : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan				
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.
		Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah; b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; c. Survei Prespektif Corruption.
			Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah; b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah.
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi; b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas; c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi; d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja.
			Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah
			Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Melaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	a. <i>Assurance Activities</i> b. <i>Consulting/Advisory Activities</i> c. <i>Anti Corruption Activities</i>
			Peningkatan mutu pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan
			Penerapan manajemen PNS	a. Menyusun peta kompetensi SDM b. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 - 2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2.5 Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam upaya menciptakan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik Tahun 2022 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung

tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain :

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas seluruh kegiatan pengawasan intern. Berdasarkan daftar rekapitulasi TLHP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai tahun 2022, diketahui jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah 1.805 rekomendasi, dengan rincian:

- Selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.030 rekomendasi (57,06%);
- Dalam Proses tindaklanjut sebanyak 467 rekomendasi (25,87%); dan
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 308 rekomendasi (17,06%).

2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jambi

Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan membangun sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif sesuai dengan amanat Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada :

- Pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- Pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi pada Pemerintah Provinsi Jambi berada pada level “Terdefinisi” dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3,084 (level 3).

Pada tingkat “Terdefinisi” berarti pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern belum didukung dokumentasi yang memadai. Dengan adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan menunjukkan indikator bahwa SPIP belum sepenuhnya diterapkan/diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan tugas bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagian auditan masih rendah terutama terkait pelaksanaan kegiatan utama Perangkat Daerah (*core business*) belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efisien
4. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Belum Optimalnya peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*, sebagaimana diketahui terkait perubahan paradigma APIP dari *watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih belum sesuai harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/101/M/A.A.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 disimpulkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2020 masih berada pada kategori “B” dengan nilai “62,32”. Tingkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut menunjukkan kategori B dengan predikat cukup baik yang mempunyai interetasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya peran APIP sebagai *quality assurance and consulting* masih

belum optimal. Atas hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, maka hal yang perlu disempurnakan terkait tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. *Quality Assurance* dan *Consulting* diharapkan bukan hanya terkait dengan keuangan, tetapi juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kinerja setiap Perangkat Daerah.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pemerintahan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai di sektor publik dari aspek fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengawasan. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum memadai dari segi kuantitas dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks dan dengan adanya penambahan Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sehingga diperlukan APIP yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi.

Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Jumlah APIP yang ada sebanyak 106 (seratus enam) ASN dari kebutuhan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) ASN sesuai Analisa Jabatan yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan, yang terdiri dari Audit Kinerja (OPD Pemerintah Provinsi, Pengawasan SMA/SMK di Kabupaten/Kota, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Umum Kabupaten/Kota) dan Audit dengan Tujuan Tertentu (*Advisory Service*, *Probity Audit*, Pemeriksaan Kasus/Khusus). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 812/KEP.GUB/SETDA-ORG-1.3/2021 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Jambi bahwa kebutuhan APIP Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan Fungsional Tertentu:

1. Fungsional Auditor tersedia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, kebutuhan 70 (tujuh puluh) orang.
2. Fungsional P2UPD sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, kebutuhan 60 (enam puluh) orang.
3. Fungsional Penata Laksana Barang sebanyak 1 (satu) orang, kebutuhan 3 (tiga) orang.

Jabatan Fungsional Umum di Sub Bagian:

1. Perencanaan dan Keuangan sebanyak 14 (empat belas) orang, kebutuhan 20 (dua puluh) orang.
 2. Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 12 (dua belas) orang kebutuhan 11 (sebelas) orang (sudah cukup).
 3. Kepegawaian dan Umum sebanyak 9 (sembilan) orang, kebutuhan 24 (dua puluh empat) orang.
6. Standar kompetensi profesional SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Masih kurangnya APIP yang belum memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Kualitas SDM perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena SDM yang berkualitas yang akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.

2.6 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 antara lain masih terbatasnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, kompeten dan berintegritas sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan belum maksimal baik secara intern di dalam lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan ektern di dalam lingkup Inspektorat dengan SKPD, Obrik, dan Masyarakat.

2.7 Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Melakukan Pembinaan Pengawasan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga terjadi peningkatan intensitas pengawasan SKPD di Lingkup Provinsi Jambi;
2. Melakukan Assistensi dan Pendampingan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan cara Mendorong SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
3. Melaksanakan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Memfasilitasi SKPD dalam Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional secara berkala dalam Mendorong SKPD agar segera menyelesaikan rekomendasi TLHP Aparat Pengawasan Fungsional;
5. Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dan Diklat Non Teknis Lainnya sehingga tercapai Peningkatan Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang lebih berkualitas.

2.8 Tantangan dan Peluang

1. Tantangan (*challenge*)

1) Penerapan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi

Pelaksanaan pengawasan saat ini belum berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan pengawasan masih dilakukan secara manual dengan meminta *hardcopy* pada auditi serta pengumpulan dan penataan Data Base Pengawasan dilakukan secara manual.

Dalam rangka melaksanakan Misi Gubernur Jambi untuk Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-goverment* yang terintegrasi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan harus didukung dengan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi.

2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya kebaikan tatakelola pemerintahan. Tatakelola pemerintah yang baik adalah prasyarat utama pembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan semakin baik tatakelola pemerintahan suatu daerah semakin cepat pula pembangunan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga terwujudnya transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, bersih, dan melayani.

3) Meningkatkan Sinergitas APIP dengan APH

Dalam melakukan koordinasi penanganan laporan dan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan peningkatan Sinergitas Kerjasama antara APIP dan APH.

4) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Memastikan APIP memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP yang kompeten dan profesional.

2. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Terdapatnya peraturan perundangan-undangan tentang:
 - Perencanaan pengawasan
 - Reformasi birokrasi
- 2) MOU Sinergitas kerjasama APIP dan APH
- 3) Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan APIP yang profesional
- 4) Adanya komitmen yang tinggi dari Gubernur tentang Pentingnya Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Adapun perencanaan pembinaan dan pengawasan pada Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi selama 8 tahun dari tahun 2016 s/d 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2023

No.	OBRIK	TAHUN								JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	SKPD	45	43	43	43	43	43	43	43	344
2.	KASUS	21	34	34	16	16	16	16	16	169
3.	KAB/KOTA	11	11	11	11	11	11	11	11	88
JUMLAH		77	88	88	70	70	70	70	70	70

Sedangkan untuk tahun 2023 direncanakan pembinaan dan pengawasan pada lingkup Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 70 obrik binaan pengawasan, yaitu :

- a) 43 SKPD
- b) 11 Kasus
- c) 11 Kabupaten/Kota

BAB 3

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja yang disingkat Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang disusun untuk satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dimana untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2024 disusun masih mengacu pada JMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

Untuk mendukung misi Gubernur Jambi “memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung oleh e-government yang terintegrasi”, dengan tujuan “mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan pelayanan publik berkualitas”. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya maka tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah “mewujudkan tata kelola Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.”

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan			1.6	1.8	2.1	2.2	2.3	2.5
			1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	89,35%	90,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
				Persentase tindak lanjut temuan BPK RI	N/A	N/A	71,00%	73,00%	75,00%	75,00%
				Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	3	3	84,50	85,30	86,00
				Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	10%	15%	20%	25%	30%	35%

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah Pembayaran Gaji dan tunjangan.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Persentasi Jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat dan telah mengikuti diklat pengawasan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator kinerja ini yaitu Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah pengadaan barang Milik daerah.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah barang milik daerah yang teelihara

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Laporan Hasil Pengawasan Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus dan Klarifikasi Kasus, Persentase Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Laporan Perkembangan Hasil Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar Rekomendasi Hasil Pengawasan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Laporan Hasil Pengawasan.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitasi Pengawasan.

b. Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Pelaksanaan Pendampingan Asistensi.

Tabel 3.2

Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah di 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat	75,00%	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI	73,00%	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Temuan BPK RI	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan BPK RI	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar c. Survei Perspektif Corruption	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
				Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 3	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	a. <i>Assurance Activities</i> b. <i>Consulting/Advisory Activities</i> c. <i>Anti Corruption Activities</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	84,50	Peningkatan mutu Pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	Penerapan manajemen PNS	a. Menyusun profil kompetensi SDM b. Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.2.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2024	
					Target	Rp
URUSAN PENGAWASAN						38.091.595.477,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT		78%	9.319.199.781,69
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal		78%	8.178.353.424,06
	1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1)	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	58 Lap	1.881.262.913,99
	2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2)	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Lap	1.436.760.744,41
	3)	Reviu Laporan Kinerja	3)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	23 Lap	126.784.468,75
	4)	Reviu Laporan Keuangan	4)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	57 Lap	296.204.278,13
	5)	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	5)	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	22 Lap	2.767.732.774,40
	6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	155 Dok	1.667.608.244,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	1.140.846.357,03
	1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1)	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	83.859.665,57
	2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2)	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19 Lap	1.056.986.691,46
Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"		53%	3.565.809.872,63
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan		7	638.770.965,00
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	7	629.300.000,00

2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	100%	2.927.038.907,63
	1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	43 PD	641.933.197,50
	2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 PD	189.473.830,88
	3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3) Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50 Keg	1.453.698.681,75
	4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 PD	641.933.197,50
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Predikat AKIP	A	25.206.585.824,18
1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Selesai dirumuskan	23 Dok	345.712.088,14
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	182.226.198,00
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	2) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	163.485.890,14
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17.000.000.000,00
	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang	17.000.000.000,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	3.499.984.632,00
	1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	3.199.984.632,00
	2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	250 Orang	150.000.000,00
	3)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undang	250 Orang	150.000.000,00

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%	2.211.025.260,01
	1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.778.640,25
	2)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	91.155.829,11
	3)	Penyediaan barang logistik kantor	3)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	178.191.342,34
	4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	128.434.587,11
	5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	26.712.907,22
	6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Lap	1.496.195.703,98
	7)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	257.556.250,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100%	300.000.000,00
	1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0.00
	2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	300.000.000,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor		100%	894.778.470,70
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	67.854.223,36
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	276.223.005,88
	3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	18.761.015,39
	4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	531.940.226,08
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Teelihara		100%	955.085.373,34
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	159.147.664,17

2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	313.988.163,67
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	181.949.545,50
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000,00

Tabel 3.2.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Pagu Indikatif Yang Ditetapkan Rp.36.647.648.577,00

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2024	
					Target	Rp
URUSAN PENGAWASAN						36.647.648.577,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT		78%	5.226.553.042,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal		78%	3.998.843.420,00
	1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1)	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	58 Lap	753.664.000,00
	2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2)	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Lap	944.075.000,00
	3)	Reviu Laporan Kinerja	3)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	23 Lap	129.278.000,00
	4)	Reviu Laporan Keuangan	4)	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	57 Lap	520.598.060,00
	5)	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	5)	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	22 Lap	840.796.160,00
	6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	155 Dok	810.432.200,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	1.227.709.622,00

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2024	
					Target	Rp
	1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1)	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	166.971.210,00
	2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2)	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19 Lap	1.060.738.412,00
Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi			Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan		53%	2.026.107.595,00
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan		7	141.511.160,00
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	7	141.511.160,00
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi		100%	1.884.596.435,00
	1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 PD	234.620.000,00
	2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 PD	162.031.060,00
	3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50 Keg	1.288.940.315,00
	4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 PD	199.005.060,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Predikat AKIP		A	29.394.987.940,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Selesai dirumuskan		23 Dok	714.110.920,00
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	199.794.168,00
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	2)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	514.316.752,00

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2024	
					Target	Rp
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	20.061.211.533,00
	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang	20.061.211.533,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%	2.537.849.075,00
	1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	2.537.849.075,00
	2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	250 Orang	0,00
	3)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	250 Orang	0,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%	1.756.114.298,00
	1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.449.318,00
	2)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.995.100,00
	3)	Penyediaan barang logistik kantor	3)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	151.020.000,00
	4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	127.600.250,00
	5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	29.062.837,00
	6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Lap	1.315.986.793,00
	7)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	0,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100%	1.359.946.830,00
	1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0.00
	2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7 Unit	1.359.946.830,00

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2024	
					Target	Rp
				Lainnya yang Disediakan		
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor		100%	1.198.296.084,00
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	101.975.520,00
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	372.545.000,00
	3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	49.737.500,00
	4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	674.038.064,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Teelihara		100%	1.767.459.200,00
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	283.270.000,00
	2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	325.490.000,00
	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	177.990.000,00
	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	980.709.200,00

BAB 4

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun mendatang.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini dapat menjadi acuan sementara dalam menyusun dokumen perencanaan selanjutnya, baik yang tertuang dalam RKA-KL dan DPA OPD berdasarkan pagu indikatif 2024.

LAMPIRAN

EVALUASI RENJIA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022

No	Kode Rekening	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Renstra s.d 2022		Realisasi capaian Kinerja Renstra s.d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENTRA s/d Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
																					I	II		III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/4*100	13 = 5 + 11	14 = 14/4*100	15													
1																											
1	6.01.01	PROGRAM PEMULIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAP	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	100%	Rp. 28.937.502.918			88 Indeks	Rp. 27.227.879.248	10,85%	Rp. 4.893.143.174	41,7%	Rp. 11.353.813.830	87,01%	Rp. 18.246.898.834	87,34%	Rp. 28.476.988.925	222,92%	Rp. 60.886.011.383	87,23%	222,92%	87,23%	Rp. 60.886.011.383	84,99%	234%	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Disfusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang telah ditetaskan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	21 Dokumen	Rp. 333.800.000			20 Dokumen	Rp. 1.156.451.846	0	Rp. 107.088.178	10,7%	Rp. 123.311.178	42,84%	Rp. 466.522.865	94,82%	Rp. 1.066.574.111	157,88%	Rp. 1.823.487.482	20 Dokumen	187,88%	20 Dokumen	Rp. 1.823.487.482	29%	649%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	4 Dokumen	Rp. 178.000.000			3 Dokumen	Rp. 612.858.972	8,51%	Rp. 102.229.860	18,8%	Rp. 115.447.860	78,87%	Rp. 483.337.881	89,44%	Rp. 609.578.883	213,35%	Rp. 1.310.590.484	4 Dokumen	213,89%	4 Dokumen	Rp. 1.310.590.484	29%	749%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.01.08	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	17 Dokumen	Rp. 157.900.000			17 Dokumen	Rp. 543.592.874	3,80%	Rp. 4.863.318	1,4%	Rp. 7.863.318	3,43%	Rp. 13.185.104	88,99%	Rp. 486.995.228	94,35%	Rp. 512.908.888	18 Dokumen	94,35%	18 Dokumen	Rp. 512.908.888	20%	329%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penetapan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	100%	Rp. 15.506.911.839			100%	Rp. 18.290.737.303	18,30%	Rp. 3.108.536.532	44,1%	Rp. 8.064.483.577	71,89%	Rp. 13.095.162.209	98,77%	Rp. 18.089.062.549	231,44%	Rp. 42.331.234.867	98,78%	231,44%	98,78%	Rp. 42.331.234.867	85%	273%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	88 Orang	Rp. 15.506.911.839			14 Bulan	Rp. 18.290.737.303	18,31%	Rp. 3.108.536.532	44,1%	Rp. 8.064.483.577	71,89%	Rp. 13.095.162.209	98,77%	Rp. 18.089.062.549	231,44%	Rp. 42.331.234.867	88 orang	231,44%	88 orang	Rp. 42.331.234.867	85%	273%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Penetapan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	100%	Rp. 3.067.984.632			100%	Rp. 2.750.239.632	20,81%	Rp. 607.017.000	36,1%	Rp. 991.992.500	93,80%	Rp. 1.479.645.708	93,87%	Rp. 2.584.366.588	205,91%	Rp. 5.883.011.787	93,88%	205,91%	93,88%	Rp. 5.883.011.787	18,07%	183%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pelatikan Direk Beserta Altitut Kependidikan	Jumlah Paket Pelatikan Direk Beserta Altitut Kependidikan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	N/A	Rp. -			0%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	-	0	Rp. -	0	0	0	Rp. -	0%	0%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	70 Orang	Rp. 3.067.984.632			100%	Rp. 2.750.239.632	20,81%	Rp. 607.017.000	36,1%	Rp. 991.992.500	93,80%	Rp. 1.479.645.708	93,87%	Rp. 2.584.366.588	37 Orang	Rp. 5.883.011.787	65 orang	205,91%	65 orang	Rp. 5.883.011.787	112%	183%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	N/A	Rp. -			0%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	-	0	Rp. -	0	0	0	Rp. -	0%	0%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.05.11	Strategi Taktis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Strategi Taktis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	N/A	Rp. -			0%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	-	0	Rp. -	0	0	0	Rp. -	0%	0%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08	Administrasi Urutan Perangkat Daerah	Penetapan Pemenuhan Saluran dan Pemenuhan Saluran	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	100%	Rp. 2.148.084.243			100%	Rp. 2.107.894.983	5,00%	Rp. 462.813.869	45,7%	Rp. 993.716.262	89,99%	Rp. 1.462.774.882	98,82%	Rp. 2.085.191.287	233,13%	Rp. 4.914.398.400	98,91%	233,13%	98,91%	Rp. 4.914.398.400	128%	229%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	12 Paket	Rp. 31.815.405			100%	Rp. 36.087.545	0	Rp. -	31,3%	Rp. 10.991.454	82,81%	Rp. 22.027.204	88,89%	Rp. 35.049.395	9 Paket	Rp. 98.078.063	12 Paket	184,92%	12 Paket	Rp. 98.078.063	91%	214%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	12 Paket	Rp. 88.477.118			100%	Rp. 89.030.118	0	Rp. -	29,8%	Rp. 26.518.273	96,72%	Rp. 53.187.030	89,79%	Rp. 88.845.737	8 Paket	Rp. 168.531.040	12 Paket	0	12 Paket	Rp. 168.531.040	0%	180%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	28 Paket	Rp. 172.955.000			100%	Rp. 151.075.000	23,84%	Rp. 33.316.968	32,8%	Rp. 49.064.068	63,08%	Rp. 95.295.896	80,82%	Rp. 137.206.533	20 Paket	Rp. 314.845.021	28 Paket	206,49%	28 Paket	Rp. 314.845.021	114%	182%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	12 Paket	Rp. 124.680.400			100%	Rp. 87.641.300	0,37%	Rp. 425.000	28,1%	Rp. 24.805.056	96,93%	Rp. 49.540.044	98,82%	Rp. 84.857.744	6 Paket	Rp. 158.428.444	12 Paket	181,81%	12 Paket	Rp. 158.428.444	142%	128%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.06	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Perundang-undangan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	12 Paket	Rp. 25.827.920			100%	Rp. 5.385.288	0	Rp. -	19,0%	Rp. 1.005.000	38,80%	Rp. 2.040.000	78,33%	Rp. 4.140.000	2 paket	Rp. 7.185.000	10 Paket	135,94%	10 Paket	Rp. 7.185.000	491%	28%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	500 Laporan	Rp. 1.452.228.400			100%	Rp. 1.739.875.720	26,89%	Rp. 368.871.993	48,9%	Rp. 851.531.293	71,31%	Rp. 1.240.733.688	98,73%	Rp. 1.739.091.858	440 Laporan	Rp. 4.198.228.832	488 Laporan	241,19%	488 Laporan	Rp. 4.198.228.832	83%	289%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	1 Dokumen	Rp. 250.000.000			100%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	-	0	Rp. -	0	0	0	Rp. -	0%	0%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan Pemenuhan Rekrutasi Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	100%	Rp. 2.230.000.000			100%	Rp. 1.009.470.988	0,21%	Rp. 3.960.000	68,0%	Rp. 656.808.058	79,49%	Rp. 821.490.558	84,84%	Rp. 859.380.958	239,59%	Rp. 2.317.861.076	84,84%	239,59%	84,84%	Rp. 2.317.861.074	81%	104%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	8 Unit	Rp. 1.000.000.000			0	Rp. -	0	Rp. -	0,0%	Rp. -	0,00%	Rp. -	0,00%	-	0	Rp. -	0	0	0	Rp. -	0%	0%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	210 Unit	Rp. 1.230.000.000			125 Unit	Rp. 1.008.470.568	0,42%	Rp. 3.960.000	68,0%	Rp. 656.808.058	79,49%	Rp. 821.490.558	84,84%	Rp. 859.380.958	178 Unit	Rp. 2.317.861.074	178 Unit	228,89%	0	Rp. 2.317.861.074	122%	188%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan Pemenuhan Jasa Pemangku Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	100%	Rp. 886.338.354			100%	Rp. 886.038.833	18,57%	Rp. 192.891.276	38,0%	Rp. 337.896.457	98,89%	Rp. 918.523.462	82,32%	Rp. 798.471.898	205,90%	Rp. 1.808.197.073	82,31%	208,80%	82,31%	Rp. 1.808.197.073	80%	269%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Sust Masyarakat	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Sust Masyarakat	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	12 Laporan	Rp. 65.595.820			100%	Rp. 101.978.820	14,50%	Rp. 14.853.000	26,1%	Rp. 28.682.722	43,82%	Rp. 44.872.880	98,68%	Rp. 60.793.372	8 Laporan	Rp. 148.382.344	8 Laporan	148,47%	8 Laporan	Rp. 148.382.344	64%	228%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	12 Laporan	Rp. 288.785.180			100%	Rp. 242.271.970	19,55%	Rp. 47.288.776	37,2%	Rp. 80.178.988	82,89%	Rp. 128.275.049	94,78%	Rp. 229.623.272	8 Laporan	Rp. 485.374.088	12 Laporan	354,47%	12 Laporan	Rp. 485.374.088	110%	188%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	12 Laporan	Rp. 18.120.000			100%	Rp. 26.170.000	14,69%	Rp. 4.285.000	36,7%	Rp. 10.425.000	91,80%	Rp. 14.895.000	88,09%	Rp. 25.100.000	8 Laporan	Rp. 54.705.000	10 Laporan	187,84%	10 Laporan	Rp. 54.705.000	62%	302%	Inspektoral Provinsi Jambi
	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Penguasaan yang Berkualitas	12 Laporan	Rp. 913.765.204			100%	Rp. 482.584.343	17,48%	Rp. 86.114.000	42,3%	Rp. 208.385.727	87,28%	Rp. 331.280.763	88,28%	Rp. 483.985.254	8 Laporan	Rp. 1.108.785.744	12 Laporan	228,38%	12 Laporan	Rp. 1.108.785.744	104%	219%	Inspektoral Provinsi Jambi

No	Kode Rekening	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Ngekat (output)	Sasaran	Target Renstra s.d 2022		Realisasi capaian Kinerja Renstra s.d Tahun N-1		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022%		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab				
											I				II				III												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 11/3*100	13 = 5 + 11	14 = 13/4*100	15																	
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Bangk Milik Daerah Pemungutan Usuan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Bangk Milik Daerah yang terpelatikan	Meningkatkan Tata Kelola Pembiayaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan	100%	Rp. 1.708.435.000	100%	Rp. 1.047.071.000	14,80%	Rp. 123.385.199	21,6%	Rp. 226.890.088	37,49%	Rp. 392.538.840	84,11%	Rp. 668.518.254	105,33%	Rp. 1.791.122.780	84,46%	98,33%	94%	Rp. 1.791.122.780	170%	88%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.01.1.08.01	Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Pemeliharaan Dinas atau Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Pemeliharaan atau Kendaran Dinas jabatan yang terpelatikan dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatkan Tata Kelola Pembiayaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan	7 Unit	Rp. 303.260.000	4 unit	Rp. 269.130.000	18,21%	Rp. 49.008.999	30,3%	Rp. 81.547.043	85,21%	Rp. 145.592.061	83,30%	Rp. 251.109.070	3 Unit	Rp. 830.287.773	6 unit	187,03%	6 unit	Rp. 830.287.773	113%	178%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.01.1.08.02	Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/Lapangan yang terpelatikan dan dibayarkan Pajaknya dan Pemeliharaannya	Meningkatkan Tata Kelola Pembiayaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan	19 Unit	Rp. 153.710.000	7 unit	Rp. 182.080.000	20,84%	Rp. 37.898.300	44,0%	Rp. 80.107.709	71,29%	Rp. 129.805.308	96,42%	Rp. 181.022.208	16 unit	Rp. 428.524.375	19 unit	235,38%	19 unit	Rp. 428.524.375	84%	276%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.01.1.08.06	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dan Mesin Lainnya yang dibayarkan	Meningkatkan Tata Kelola Pembiayaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan	170 Unit	Rp. 175.732.800	103 unit	Rp. 130.197.800	16,88%	Rp. 20.287.000	25,3%	Rp. 30.497.000	81,84%	Rp. 81.349.800	78,88%	Rp. 95.654.500	59 unit	Rp. 207.798.000	130 unit	172,88%	135 unit	Rp. 207.798.000	140%	118%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.01.1.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Meningkatkan Tata Kelola Pembiayaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan	4 Unit	Rp. 1.135.732.800	3 unit	Rp. 475.693.200	3,47%	Rp. 19.500.000	7,3%	Rp. 34.598.296	11,16%	Rp. 52.791.480	96,89%	Rp. 460.732.775	1 unit	Rp. 564.562.883	4 unit	119,89%	4 unit	Rp. 564.562.883	239%	90%	Inspektoral Provinsi Jambi						
2	8.01.02	PROGRAM PENYELenggaraAN PENGHASARAN	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	72%	Rp. 8.045.345.172	87%	Rp. 7.328.773.347	8,42%	Rp. 878.740.239	41,6%	Rp. 3.063.894.781	80,12%	Rp. 4.408.792.518	93,21%	Rp. 6.852.218.915	207,12%	Rp. 15.181.572.853	87,11%	207,12%	87,11%	Rp. 15.181.572.853	85,34%	188%	Inspektoral Provinsi Jambi							
	8.01.02.1.01	Pemeliharaan Pemeliharaan Internal	Pemeliharaan Pemeliharaan Internal	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	72%	Rp. 7.839.023.300	87%	Rp. 6.109.548.525	18,11%	Rp. 819.948.808	20,4%	Rp. 1.737.018.418	85,62%	Rp. 3.387.827.827	92,42%	Rp. 5.948.272.986	194,92%	Rp. 11.288.068.039	88,54%	86,22%	0,87	Rp. 11.288.068.039	117,32%	142%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemeliharaan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	52 Laporan	Rp. 1.825.960.000	70%	Rp. 1.343.363.380	2,9%	Rp. 33.031.156	17,9%	Rp. 240.278.750	88,04%	Rp. 778.847.598	88,91%	Rp. 1.337.336.131	23 Laporan	Rp. 2.380.320.548	51 Laporan	177,19%	51 Laporan	Rp. 2.380.320.548	139%	130%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemeliharaan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	38 Laporan	Rp. 1.384.540.000	70%	Rp. 1.441.836.900	1,2%	Rp. 17.763.354	8,8%	Rp. 136.687.598	35,49%	Rp. 511.752.264	88,06%	Rp. 1.385.036.880	23 Laporan	Rp. 2.053.219.878	37 Laporan	142,40%	37 Laporan	Rp. 2.053.219.878	97%	147%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja Pemeliharaan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	21 Laporan	Rp. 125.000.000	100%	Rp. 125.758.000	60,3%	Rp. 75.798.050	82,6%	Rp. 103.848.000	85,51%	Rp. 107.531.650	87,77%	Rp. 122.958.000	15 Laporan	Rp. 410.135.750	21 Laporan	328,13%	21 Laporan	Rp. 410.135.750	99%	328%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.01.04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Pemeliharaan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	55 Laporan	Rp. 287.500.000	100%	Rp. 507.718.080	20,4%	Rp. 108.032.406	37,6%	Rp. 195.732.608	47,16%	Rp. 245.290.824	98,99%	Rp. 520.751.744	47 Laporan	Rp. 1.067.807.880	55 Laporan	205,04%	55 Laporan	Rp. 1.067.807.880	85%	371%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.01.05	Pengawasan Usuan dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuan dan Teknis Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	21 Laporan	Rp. 2.686.400.000	70%	Rp. 1.538.289.709	1,8%	Rp. 27.839.534	38,1%	Rp. 586.333.406	71,39%	Rp. 1.097.894.824	88,30%	Rp. 1.358.231.160	14 Laporan	Rp. 3.070.388.048	19 Laporan	199,80%	19 Laporan	Rp. 3.070.388.048	175%	114%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemantauan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan ANP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TindakLanjut Hasil Pemantauan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan ANP	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	155 Dokumen	Rp. 1.618.603.800	70%	Rp. 1.139.540.200	22,0%	Rp. 256.484.084	41,4%	Rp. 472.158.044	67,83%	Rp. 656.611.040	81,78%	Rp. 931.932.070	105 Dokumen	Rp. 2.316.185.238	127 Dokumen	203,38%	127 Dokumen	Rp. 2.316.185.238	142%	143%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.02	Pemeliharaan Pemeliharaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeliharaan Pemeliharaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	Rp. 1.107.321.372	87%	Rp. 1.220.226.852	18,3%	Rp. 361.793.431	50,9%	Rp. 618.182.568	82,88%	Rp. 1.008.924.191	97,19%	Rp. 1.185.942.830	200,02%	Rp. 3.172.941.051	87,19%	76,89%	97,19%	Rp. 3.172.941.051	73,41%	287%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.02.01	Pengawasan Pemeliharaan Kangan Negeri/Desah yang diklatasi	Jumlah Laporan pemeliharaan surtiker kangan negeri/desah yang diklatasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	2 Laporan	Rp. 81.395.380	100%	Rp. 163.743.210	1,27%	Rp. 2.082.356	1,3%	Rp. 2.062.356	62,49%	Rp. 102.306.262	98,77%	Rp. 163.367.510	1 Laporan	Rp. 269.836.484	2 Laporan	164,78%	2 Laporan	Rp. 269.836.484	97%	332%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	19 Laporan	Rp. 1.025.926.012	100%	Rp. 1.056.483.812	34,05%	Rp. 359.709.075	58,1%	Rp. 614.100.243	88,51%	Rp. 906.617.829	98,79%	Rp. 1.022.575.320	16 Laporan	Rp. 2.803.002.867	18 Laporan	274,76%	18 Laporan	Rp. 2.803.002.867	115%	283%	Inspektoral Provinsi Jambi						
3	8.01.03	Program Pemusunan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persepsi Pemangagk Daerah yang memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi Kategori "B"	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	38%	Rp. 3.388.820.000	25,37%	Rp. 2.865.784.253	28,23%	Rp. 832.890.050	44,7%	Rp. 1.328.845.363	85,95%	Rp. 1.842.545.835	95,34%	Rp. 2.924.543.875	232,89%	Rp. 8.806.826.023	38,19%	232,89%	38,19%	Rp. 8.806.826.023	129%	203%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.03.1.01	Pemusunan Kebijakan Teknis a Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis a Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	17 Rekomendasi	Rp. 620.000.000	7 Penertulan	Rp. 45.930.000	0,50	Rp. -	14,9%	Rp. 6.840.000	14,89%	Rp. 6.840.000	81,63%	Rp. 28.250.000	8.9131267	Rp. 41.840.000	10 Rekomendasi	1,98%	10 Rekomendasi	Rp. 41.840.000	22%	7%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.03.1.01.01	Pemusunan Kebijakan Teknis a Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang telah diumumkan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	17 Rekomendasi	Rp. 620.000.000	7 Penertulan	Rp. 45.930.000	0	Rp. -	14,9%	Rp. 6.840.000	14,89%	Rp. 6.840.000	81,63%	Rp. 28.260.000	8 Rekomendasi	Rp. 41.840.000	10 Rekomendasi	81,31%	10 Rekomendasi	Rp. 41.840.000	22%	7%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persepsi OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	Rp. 2.778.820.000	80%	Rp. 2.019.804.282	50,54%	Rp. 812.880.000	43,2%	Rp. 1.320.006.363	89,39%	Rp. 1.836.705.835	85,77%	Rp. 2.798.283.975	235,11%	Rp. 8.884.988.023	86,78%	235,11%	96,79%	Rp. 8.884.988.023	205%	247%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan Pendampingan dan Asistensi Usuan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	43 Perangkat Daerah	Rp. 526.000.000	43 OPD	Rp. 259.059.300	79,7%	Rp. 206.440.500	78,7%	Rp. 206.440.500	79,89%	Rp. 206.440.500	88,51%	Rp. 257.793.000	43 Perangkat Daerah	Rp. 877.114.500	43 Perangkat Daerah	338,88%	43 Perangkat Daerah	Rp. 877.114.500	2033%	187%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	43 Perangkat Daerah	Rp. 163.000.000	42 OPD	Rp. 150.531.680	36,5%	Rp. 54.900.000	43,6%	Rp. 65.604.912	85,93%	Rp. 80.581.423	86,01%	Rp. 147.543.443	20 Perangkat Daerah	Rp. 348.828.778	43 Perangkat Daerah	231,80%	43 Perangkat Daerah	Rp. 348.828.778	1222%	191%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.03.1.02.03	Koordinat, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	Kemlitan Kegiatan Koordinat, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	46 Kegiatan	Rp. 1.418.000.000	75 Kegiatan	Rp. 2.383.086.252	19,8%	Rp. 474.070.550	40,3%	Rp. 953.921.300	84,64%	Rp. 1.542.353.750	98,38%	Rp. 2.282.573.970	35 Kegiatan	Rp. 5.262.848.870	44 Kegiatan	219,82%	44 Kegiatan	Rp. 5.262.848.870	59%	371%	Inspektoral Provinsi Jambi						
	8.01.03.1.02.03	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bereth, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	3 Perangkat Daerah	Rp. 649.820.000	2 OPD	Rp. 117.185.080	68,2%	Rp. 77.579.000	71,7%	Rp. 84.039.651	80,71%	Rp. 108.398.962	82,48%	Rp. 108.373.562	2 Perangkat Daerah	Rp. 378.292.178	3 Perangkat Daerah	321,1%	3 Perangkat Daerah	Rp. 378.292.178	5555%	88%	Inspektoral Provinsi Jambi						
						Rp. 37.523.637.844	17%	Rp. 6.194.873.463	41,69%	Rp. 15.754.324.774	65,6%	Rp. 24.965.956.287		Rp. 36.152.385.715		Rp. 82.677.510.209	Persepsi Sempun Anggapan per Desember 2022	86,39%													
Predikat Kinerja																															

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6														
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01									38,246,520,195				37,562,834,913
6	01	01								25,552,579,846				24,805,424,860
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					338,908,500				340,603,043
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	178,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			179,533,200
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17 Laporan	160,268,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			161,069,843
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15,817,050,076				16,500,000,000
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			98 Orang/ Bulan	15,817,050,076	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,500,000,000
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3,499,984,632				3,499,984,632
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	112,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			112,000,000
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			70 Orang	3,087,984,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,087,984,632
6	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			250 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			250 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,174,505,207				2,187,877,733
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	32,292,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,454,099
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	89,804,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,253,296
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			28 Paket	175,549,325	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			176,427,072

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		126,530,306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			127,162,958	
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen		26,316,839	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,448,423	
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan		1,474,011,826	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,481,381,885	
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			253,750,000	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,050,000,000				350,000,000		
6	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit		750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							877,169,297				881,555,143		
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan		66,518,857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,851,452	
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		270,786,958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			272,140,892	
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan		18,391,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,483,759	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		521,471,682	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			524,079,040	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,794,962,134				1,045,404,309		
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit		156,015,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			156,795,728	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			21 Unit		307,808,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			309,347,945		
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			170 Unit		178,368,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			179,260,636		
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit		1,152,768,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000,000		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							9,181,025,349			9,226,930,478			
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							8,057,094,157			8,097,379,629			
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			54 Laporan		1,853,369,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,862,636,549		
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			40 Laporan		1,415,458,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,422,535,391		
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			21 Laporan		126,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			127,509,375		
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			55 Laporan		291,812,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			293,271,563		
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			21 Laporan		2,726,696,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,740,329,480		
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			155 Dokumen		1,642,882,857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,651,097,271		
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							1,123,931,192			1,129,550,849			
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			2 Laporan		82,616,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			83,029,372		
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			19 Laporan		1,041,314,902	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,046,521,477		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							3,512,915,000			3,530,479,575			
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan							629,300,000			632,446,500			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				7 Rekomendasi		629,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			632,446,500	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi							2,883,615,000				2,898,033,075		
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				43 Perangkat Daerah		629,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			632,446,500	
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				43 Perangkat Daerah		185,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			186,673,725	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				46 Kegiatan		1,439,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,446,466,350	
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 Perangkat Daerah		629,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			632,446,500	
TOTAL													38,246,520,195				37,562,834,913	